

Gambaran Kesehatan Lingkungan Kerja pada Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur

Overview Of Workplace Environmental Health At The Regent's Office And The Dprd Office Of East Manggarai Regency

Herlina L.D. Miyati^{1*}, Mustakim Sahdan², Soni Doke³

^{1,2,3} Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*Corresponding Author: Email: herlinaloladefrisamiyati@gmail.com

Abstract Offices can pose potential hazards that affect employee safety and health. In East Manggarai Regency, the Regent's Office and the DPRD Office have yet to provide optimal working comfort, especially regarding environmental health. This study aims to describe the work environment health conditions in both offices. The research is descriptive observational and was conducted at both offices from June to July 2024. The study population includes office rooms: 7 units in the Regent's Office and 6 units in the DPRD Office. Data collection tools included questionnaires and observation sheets. Results showed that in the Regent's Office, 2 of 7 rooms (83%) met safety standards, while 5 rooms (50–66%) did not. In the DPRD Office, 2 rooms met standards (83%), while 4 rooms (16%) did not. Accessibility in both offices was poor (33–65%). Clean water access met standards in 7 rooms (80%) of the Regent's Office and in 2 rooms (80%) of the DPRD Office. Toilet facilities were below standard in both offices (0–73%). Domestic solid waste management failed in the Regent's Office (0%) but was adequate in DPRD's general (88%) and finance (75%) sections.

Keywords: Health, Work Environment, Office, Regent, DPRD

Abstrak. Perkantoran memiliki potensi bahaya yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesehatan karyawan. Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya mendukung kenyamanan kerja, terutama dalam aspek kesehatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi kesehatan lingkungan kerja di kedua kantor tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif observasional yang dilakukan pada Juni–Juli 2024. Populasi penelitian mencakup ruangan di kedua kantor, dengan sampel 7 unit di Kantor Bupati dan 6 unit di Kantor DPRD. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan lembar observasi. Hasil menunjukkan bahwa di Kantor Bupati, 2 dari 7 ruangan (83%) memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, sementara 5 ruangan (50–66%) tidak memenuhi. Di Kantor DPRD, 2 ruangan memenuhi syarat (83%) dan 4 lainnya tidak (16%). Aksesibilitas di kedua kantor masih bermasalah (33–65%). Penyediaan air bersih memenuhi syarat di 80% ruangan Kantor Bupati dan 2 ruangan di Kantor DPRD, namun 4 ruangan lainnya belum memenuhi (60%). Toilet tidak memenuhi syarat di kedua kantor (0–73%). Pengelolaan limbah padat di Kantor Bupati tidak memenuhi syarat (0%), sedangkan di DPRD lebih baik (bagian umum 88%, keuangan 75%). Limbah cair tidak memenuhi syarat di kedua kantor (50%).

Kata Kunci: Kesehatan, Lingkungan Kerja, Kantor ,Bupati, DPRD

1. PENDAHULUAN

Perkantoran sebagai salah satu tempat kerja, tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para karyawan didalamnya. Standar lingkungan kerja perkantoran meliputi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran dan standar lingkungan kerja perkantoran merupakan salah satu dari lima standar dalam rangka mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja di gedung perkantoran (Kemenkes RI, 2016).

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai pada Tahun 2007. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan pada Kantor Bupati dan kantor DPRD di Kabupaten Manggarai Timur, keadaan lingkungan kerja tidak sesuai dengan standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran dimana keadaan lingkungan kerja di perkantoran di Kantor Bupati dan kantor DPRD di Kabupaten Manggarai Timur belum mendukung karyawan untuk bekerja dengan nyaman. Bangunan, yaitu fasilitas yang mendukung aktivitas sentral kegiatan perusahaan utama seperti perkantoran dan pergudangan, dimana gudang terlihat sangat penuh dengan perkakas kantor yang tidak digunakan lagi menyebabkan banyak binatang seperti tikus dan kecoa bersarang dan sarana prasarana toilet yang tidak memadai (ketersediaan air, sabun cuci tangan dan kebersihan toilet) dan luas ruang kerja yang kurang memadai sehingga membatasi ruang gerak karyawan juga temperatur suhu ruangan yang tinggi.

2. METODE

Jenis penelitian deskriptif observasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggali informasi tentang suatu fenomena tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kesehatan lingkungan perkantoran di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Analisis sampel yaitu 7 unit ruangan yang ada pada kantor Bupati dan 6 ruangan pada kantor DPRD. Waktu penelitian pada bulan Juni sampai bulan Juli 2024. Populasi dalam penelitian ini merupakan unit kerja yang terdiri dari Kantor Bupati dan Kantor DPRD di Kabupaten Manggarai Timur yang sudah dilakukan observasi berjumlah 7 unit ruangan yang ada pada kantor Bupati dan 6 ruangan pada kantor DPRD.

Penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan 13 sampel. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner mengumpulkan informasi tentang persepsi karyawan, sementara lembar observasi digunakan untuk mengamati kondisi fisik lingkungan kerja secara langsung. Validitas dan reliabilitas instrumen diperiksa untuk memastikan kualitas data. Proses analisis data melibatkan pengumpulan dokumentasi, pengkodean, kategorisasi dan penyusunan temuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan lingkungan kerja di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

3. HASIL

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Keamanan dan Keselamatan Di Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Timur

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ Nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	6	5	83	1	17	Memenuhi syarat
Ruang Kerja Bupati	6	4	66	2	34	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Humas Dan Protokol	6	3	50	3	50	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Unit Pelayanan Dan Jasa	6	4	66	2	34	Tidak Memenuhi syarat
Bagian sekertaris daerah	6	5	83	1	17	Memenuhi syarat
Ruang Rapat umum	6	3	50	3	50	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	6	4	66	2	34	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari 7 ruangan yang diteliti, 2 ruangan (83%) memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, sementara 5 ruangan (50%-66%) tidak memenuhi syarat

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Keamanan dan Keselamatan Di

Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ Nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	6	5	83	1	17	Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	6	4	83	2	17	Memenuhi syarat
Ruang Rapat	6	3	50	3	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	6	4	33	2	67	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	6	1	17	5	83	Tidak Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	6	3	50	3	50	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 6 ruangan yang diteliti, 2 ruangan (83%) memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, sementara 4 ruangan lainnya tidak memenuhi syarat (16%-50%).

Tabel 3 Hasil Penilaian Aksesibilitas Sarana Bangunan Di Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Timur

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	9	5	55	4	45	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Kerja Bupati	9	3	33	6	67	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Humas Dan Protokol	9	3	33	6	67	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Unit Pelayanan Dan Jasa	9	4	44	5	56	Tidak Memenuhi syarat
Bagian sekertaris daerah	9	5	55	4	45	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Rapat umum	9	4	44	5	65	Tidak Memenuhi syarat

Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	9	3	33	6	67	Tidak Memenuhi syarat
------------------------------------	---	---	----	---	----	-----------------------

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 7 ruangan tidak memenuhi syarat, dengan persentase antara 33% hingga 55%.

Tabel 4 Hasil Penilaian Aksesibilitas Sarana Bangunan Di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	9	4	44	5	56	Tidak Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	9	5	56	4	44	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Rapat	9	2	22	3	78	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	9	1	11	4	11	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	9	2	22	5	89	Tidak Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	9	3	33	3	67	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 6 unit ruangan di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur, hanya 2 ruangan yang memenuhi syarat aksesibilitas, yaitu Ruang Rapat (78%) dan Bagian Unit Pelayanan dan Jasa (89%), sementara 4 ruangan lainnya masih belum memenuhi syarat.

**Tabel 5 Hasil Penilaian Penyediaan Air Bersih di Kantor Bupati Kabupaten
Manggarai Timur**

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Ruang Kerja Bupati	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Bagian Humas Dan Protokol	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Bagian Unit Pelayanan Dan Jasa	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Bagian sekertaris daerah	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Ruang Rapat umum	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 7 ruangan (80%) memenuhi syarat penyediaan air bersih, termasuk pemerintahan umum, ruang kerja bupati, humas, unit pelayanan, sekretaris daerah, pertemuan, dan organisasi.

Tabel 6 Hasil Penilaian Penyediaan Air Bersih di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	5	4	80	1	20	Memenuhi syarat
Ruang Rapat	5	3	60	2	40	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	5	3	60	2	40	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	5	3	60	2	40	Tidak Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	5	3	60	2	40	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 6 ruangan, 2 ruangan (80%) memenuhi syarat, yaitu bagian umum dan ruang pimpinan DPRD, sementara 4 ruangan lainnya (60%) tidak memenuhi syarat, termasuk ruang persidangan, keuangan, unit pelayanan, dan hukum.

Tabel 7 Hasil Penilaian Ketersediaan Toilet di Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Timur

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	11	5	45	6	55	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Kerja Bupati	11	5	45	6	55	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Humas Dan Protokol	11	0	0	11	100	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Unit Pelayanan Dan Jasa	11	3	27	8	73	Tidak Memenuhi syarat
Bagian sekretaris daerah	11	3	27	8	73	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Rapat umum	11	5	45	3	55	Tidak Memenuhi syarat
Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	11	0	0	11	100	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa 7 ruangan tidak memenuhi syarat toilet, dengan persentase: administrasi umum dan ruang kerja bupati (45%), unit pelayanan dan sekretaris daerah (27%), serta organisasi dan humas (0%).

Tabel 8 Hasil Penilaian Ketersediaan Toilet di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	11	7	64	4	36	Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	11	6	55	5	45	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Rapat	11	5	45	6	55	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	11	8	73	3	27	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	11	0	0	11	100	Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	11	5	45	6	55	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 8 meunjukkan bahwa ruang bagian umum (64%), bagian Keuangan (73%), ruang rapat (45%), ruang pimpinan DPRD (55%), bagian Unit Pelayanan dan Jasa (0%), serta ruang bagian hukum dan perundang-undangan (45%).

**Tabel 9 Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Padat Domestik di Kantor Bupati
Kabupaten Manggarai Timur**

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	8	7	88	1	12	Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	8	6	75	2	25	Memenuhi syarat
Ruang Rapat	8	0	0	8	100	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	8	5	63	3	37	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	8	0	0	8	100	Tidak Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	8	5	63	3	37	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa ruang bagian administrasi pemerintahan umum (62%), ruang kerja bupati, ruang pertemuan, ruang bagian unit pelayanan dan jasa, ruang bagian sekretaris daerah, ruang bagian organisasi dan tata laksana, serta bagian humas dan protokol (0%).

**Tabel 10 Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Padat Domestik di Kantor DPRD
Kabupaten Manggarai Timur**

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					keterangan
	Bobot/ Nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	8	5	62	3	38	Tidak Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	8	0	0	8	100	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Rapat	8	0	0	8	100	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	8	0	0	8	100	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	8	0	0	8	100	Tidak Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	8	0	0	8	100	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 10 menunjukan Enam unit ruangan di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak seluruhnya memenuhi syarat pengelolaan limbah padat domestik. Ruang Bagian Umum memenuhi 88%, Ruang Pimpinan DPRD 75%, Ruang Keuangan dan Hukum 63%, sementara Ruang Rapat serta Unit Pelayanan dan Jasa tidak memenuhi syarat sama sekali (0%).

Tabel 11 Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Cair di Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					Keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Rapat	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 11 menunjukkan Seluruh ruangan, termasuk Administrasi Pemerintahan Umum, Ruang Kerja Bupati, Ruang Rapat, Unit Pelayanan dan Jasa, Sekretaris Daerah, Organisasi dan Tata Laksana, serta Humas dan Protokol, hanya memenuhi 50% dari kriteria yang dipersyaratkan.

Tabel 12 Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Cair di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

Ruangan Yang Diperiksa	Penilaian					keterangan
	Bobot/ nilai	Ya	%	Tidak	%	
Bagian Umum	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang pimpinan DPRD	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang Rapat	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang keuangan	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Bagian unit pelayanan dan jasa	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat
Ruang bagian hukum dan perundang-undangan	4	2	50	2	50	Tidak Memenuhi syarat

Tabel 12 menunjukkan nam unit ruangan di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak memenuhi syarat pengelolaan limbah cair. Seluruh ruangan, termasuk Bagian Umum, Keuangan, Rapat, Pimpinan DPRD, Unit Pelayanan dan Jasa, serta Hukum dan Perundang-undangan, hanya memenuhi 50% dari kriteria yang dipersyaratkan.

DISKUSI

Gambaran kesehatan lingkungan Sarana Bangunan (keamanan dan keselamatan dan aksesibilitas) Dikantor Bupati Dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

1) Keamanan dan Keselamatan

Keamanan dan keselamatan kerja penting untuk menciptakan kenyamanan dan mendukung produktivitas pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 ruangan di Kantor Bupati, hanya 2 ruangan (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Sekretaris Daerah) yang memenuhi syarat (83%). Lima ruangan lainnya tidak memenuhi syarat (50–66%). Di Kantor DPRD, dari 6 ruangan, hanya 2 yang memenuhi syarat (Bagian Umum dan Pimpinan DPRD), sementara 4 ruangan lainnya tidak (17–50%).

Masalah umum yang ditemukan antara lain:

- Tidak adanya sistem penangkal petir.
- Beberapa ruangan tidak memiliki tempat sampah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, stres, dan menurunkan produktivitas pegawai. Penelitian ini sejalan dengan temuan Widodo (2023) mengenai pentingnya sistem keselamatan bangunan.

2) Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya (Permen PUPR No 14, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak memenuhi syarat aksesibilitas. Di Kantor Bupati, hanya beberapa ruangan yang mendekati standar (55%), sementara di Kantor DPRD, tingkat kepatuhan aksesibilitas sangat rendah, dengan Ruang Keuangan (11%) dan Unit Pelayanan dan Jasa (22%). Kedua kantor tidak menyediakan fasilitas penting seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, dan fasilitas komunikasi. Selain itu, area parkir yang ada tidak memadai karena rumput tinggi, sehingga pegawai harus memarkir kendaraan di sekitar gedung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2017) yang mengungkapkan banyak perkantoran yang mengabaikan aksesibilitas penyandang disabilitas, serta penelitian Trumansyahjaya (2012) yang mencatat masalah serupa dengan area parkir di Universitas Negeri Gorontalo.

Bangunan perkantoran yang tidak memenuhi syarat aksesibilitas dapat menghambat akses penyandang disabilitas, terutama jika tidak ada fasilitas seperti ramp, lift, atau pintu lebar.

Gambaran kesehatan lingkungan Penyediaan Air Di Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024

Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenkes RI No 48, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 unit ruangan di kantor Bupati Manggarai Timur memenuhi syarat penyediaan air bersih (80%), termasuk bagian administrasi, ruang kerja Bupati, Humas dan Protokol, unit pelayanan dan jasa, sekretariat daerah, ruang rapat umum, serta organisasi dan tata laksana. Di kantor DPRD, 2 unit ruangan memenuhi syarat (80%), yaitu bagian umum dan ruang pimpinan DPRD, sementara 4 unit ruangan lainnya tidak memenuhi syarat (60%). Wawancara mengungkapkan bahwa belum ada kantor yang melakukan pengambilan sampel air bersih secara rutin, karena air hanya digunakan untuk kebutuhan toilet dan mencuci tangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Istiqamah (2015) yang menunjukkan bahwa sumber air bersih di Terminal Regional Daya Makassar berasal dari sumur bor, dengan kondisi air yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Air disalurkan ke bak penampungan melalui sistem perpipaan, dan pembersihan dilakukan setiap tiga bulan. Penelitian ini juga mendukung temuan Maryam Kandari (2009) mengenai kualitas air bersih di Terminal Cicaheum Bandung yang memenuhi syarat fisik. Trumansyahjaya (2012) juga mencatat bahwa bangunan yang diperiksa menggunakan air bersih dari PDAM dengan instalasi pemipaan yang sesuai standar.

Air yang tidak bersih atau terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti diare, infeksi kulit, dan penyakit serius lainnya. Hal ini dapat meningkatkan absensi karyawan, biaya perawatan kesehatan, dan menurunkan produktivitas.

Gambaran Kesehatan Lingkungan toilet Di Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024

Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil tempat cuci tangan dan muka. toilet adalah salah satu sarana yang diperlukan di dalam suatu bangunan. penggunaan toilet sangat intens sehingga diperlukan jumlah yang sesuai dengan keadaan toilet yang baik (Djago, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kantor Bupati Manggarai Timur, 7 unit ruangan tidak memenuhi syarat ketersediaan toilet, dengan 45% di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Ruang Kerja Bupati, dan Ruang Rapat Umum, sedangkan beberapa ruangan lainnya tidak memenuhi syarat (0%). Di kantor DPRD, 6 unit ruangan tidak memenuhi syarat, dengan 64% di ruang bagian umum, 73% di bagian keuangan, dan 45% di ruang rapat, sedangkan beberapa ruangan lainnya juga tidak memenuhi syarat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa fasilitas toilet sering kali tidak terpelihara dengan baik. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain pemisahan toilet pria dan wanita yang tidak memadai, penyediaan air yang buruk, penggunaan material berkualitas rendah, dan kurangnya perawatan rutin. Penelitian oleh Trumansyahjaya (2019) dan Adiwoso (2011) mengungkapkan bahwa kebersihan toilet sering terganggu dengan adanya kotoran, serangga, dan tikus, yang dapat menyebabkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan hepatitis A. Selain itu, penelitian oleh Istiqamah (2015) menunjukkan bahwa banyak toilet yang tidak berfungsi dan tidak memenuhi syarat kesehatan, seperti kurangnya pemisahan toilet pria dan wanita, serta ketidaktersediaan fasilitas pengolahan air limbah yang memadai.

Ketiadaan toilet yang memadai di gedung kantor dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, kenyamanan, produktivitas, dan citra kantor.

Gambaran Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Limbah (Limbah Padat Domestik Dan Limbah Cair) Di Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI No 48, 2016).

1) Limbah padat domestik

Pengelolaan limbah padat adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah dan pembuangan akhir atau penimbunan hasil pengolahan tersebut. (Djago, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah padat di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak memenuhi syarat. Di kantor Bupati, hanya 62% ruangan yang memenuhi syarat, sementara lainnya 0%. Di kantor DPRD, pengelolaan limbah padat lebih baik, dengan ruang bagian umum (88%) dan ruang pimpinan DPRD (75%) memenuhi syarat, namun ruang lainnya masih kurang memenuhi syarat. dari hasil tersebut menunjukan bahwa ada beberapa ruangan yang belum memiliki tempat sampah, jadi sampah bekas pakai akan di tampung di kantong, yang kemudian di simpan di dekat meja kerjanya. Adapun ruangan yang memiliki tempat sampah namun tidak ada penutupnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa beberapa tempat sampah tidak memiliki tutup, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Penelitian oleh Andriani dkk. (2013) dan Hamdani dkk. (2019) menemukan bahwa tempat sampah di beberapa tempat tidak memadai, seperti di RSUD Kabupaten Klungkung dan pasar, di mana sampah ditampung di kantong plastik. Tempat sampah tanpa tutup dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan virus, yang meningkatkan risiko penyakit menular, serta menarik hama seperti tikus dan lalat yang dapat menyebarkan penyakit.

2) Limbah Cair

Limbah cair rumah tangga atau domestik adalah air buangan yang berasal dari penggunaan untuk kebersihan yaitu gabungan limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian, dan sebagainya (Puji dan Nur Rahmi, 2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 unit ruangan di kantor Bupati Manggarai Timur dan 6 unit ruangan di kantor DPRD tidak memenuhi syarat pengelolaan limbah cair, dengan 50% ruangan di kedua kantor tidak memiliki saluran limbah cair yang tertutup dan tidak mengalir dengan lancar akibat penyumbatan tanah di saluran. Hal ini menunjukkan kedua kantor belum mengelola limbah cair dengan baik, yang berisiko mencemari lingkungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Trumansyahjaya (2012) dan Birawida (2019), yang menunjukkan masalah pada saluran luar bangunan yang tertutup tanah, tidak ada penyaluran ke saluran kota, dan kurangnya pemeliharaan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang Gambaran Kesehatan Lingkungan Kerja Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

- 1) Gambaran kesehatan lingkungan sarana bangunan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan belum memenuhi syarat keamanan, keselamatan, dan aksesibilitas bangunan. Hanya sebagian kecil ruangan yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan (83%), sementara sisanya masih berada di bawah standar. Demikian pula, tingkat aksesibilitas di kedua kantor masih rendah, berkisar antara 11% hingga 56%, tanpa ada ruangan yang sepenuhnya memenuhi syarat.
- 2) Gambaran penyediaan air di perkantoran pada Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 telah memenuhi syarat penyediaan air bersih (80%). Sementara itu, di Kantor DPRD, hanya dua dari enam ruangan yang memenuhi syarat (80%), sedangkan sisanya masih belum memenuhi standar (60%)
- 3) Gambaran kesehatan lingkungan toilet di perkantoran pada Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur belum memenuhi syarat ketersediaan toilet. Di Kantor Bupati, tingkat pemenuhan berada di kisaran 0%–45%, sedangkan di Kantor DPRD berkisar antara 0%–73%, dengan sebagian besar ruangan masih di bawah standar.
- 4) Gambaran kesehatan lingkungan pengelolaan limbah (limbah padat domestik dan limbah cair) pada Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 tidak memenuhi syarat pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Di Kantor Bupati, hanya ruang administrasi yang memenuhi syarat pengelolaan limbah padat (62%) dan limbah cair (50%), sementara ruangan lainnya masih jauh dari standar. Di Kantor DPRD, meskipun ruang

bagian umum dan pimpinan sebagian memenuhi syarat untuk pengelolaan limbah padat (88% dan 75%), sebagian besar ruangan lainnya masih belum memenuhi standar untuk limbah padat (0–63%) dan limbah cair (50%).

5. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Apris A. Adu, S.Pt, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, atas dukungan dan arahnya selama proses perkuliahan;
2. Bapak Mustakim Sahdan, SKM., M.Kes selaku Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, atas segala bantuan dan bimbingannya;
3. Ibu Dr. Marylin Susanti Junias, ST., M.Kes selaku Dosen Penasihat Akademik, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah membimbing dan memberikan arahan selama masa studi;
4. Cinta pertama dan panutan penulis, Papa Gregorius Tomi, serta pintu surgaku, Mama Melania Jena tercinta, atas kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti yang telah mengiringi setiap langkah penulis dalam menempuh perkuliahan;
5. Adik-adik tersayang, Kristianus Defrio dan Anjella Emanuel Partini, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan motivasi;

Segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan sangat berarti bagi penulis, dan penulis menghaturkan terima kasih yang tulus atas segala kebaikan tersebut.

6. DAFTAR REFERENSI

- Adioetomo, & Samosir. (2010). *Dasar-dasar Demografi edisi 2*. Penerbit Salemba Empat.
- Bhastary, M. D., & Suwardi, K. (2018). Analisis Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Samudera Perdana. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*.
- Damayanti,, E. (2012). *Toilet Umum*.<https://atmajayanews.wordpress.com/>
- Djago, L. O. (2022). Gambaran Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Universitas Nusa Cendana Kupang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Effendi, H., & Hefni. (2003). *Telaah kualitas air: Bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius
- Fauzia, R. N. (2018). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan social commerce di Indonesia* (Skripsi tidak diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Firdaus, & Fadilah, N. (2021). Analisis pengelolaan limbah padat Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangkaraya, Kalimantan Timur. *Jurnal Sultan Agung Fundamental*, (2021), 41–64.
- GINANJAR, R. A. (2013). *Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Lumbung Pustaka UNY.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). (2019). *Standar toilet umum Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Muhammad Luxson, S. D. (2010). *Kebisingan di tempat kerja*. Bandung: Kesehatan Bina Husada.
- Muharnis, & Khoirudinsyah. (2017). Analisa perbandingan pengukuran intensitas cahaya Peaktech tipe 5035 dengan sensor IDR berbasis mikrokontroler Atmega 8535 di Gedung Teknik Elektro Politeknik Negeri Bangkalis. *Jurnal Saintek STT Pekanbaru*.
- Nafika, I. (2008). *Vektor penyakit dan pengendaliannya*. Koran Pendidikan.
- Nasihin. (2022). *Pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan karyawan (Studi kasus pada karyawan PT Kirana Surya Perkasa di Jakarta)*. Repository STIE Indonesia.
- N Nelu, Y. R. (2018). *Pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (Skripsi tidak diterbitkan)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- N Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuridin. (2017). Pengaruh K3 dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen Bisnis Krinadwipayana*.
- Pamungkas, M., & Rohmah, Y. S. (2015). Perancangan dan realisasi alat pengukur intensitas cahaya. *Jurnal Elkomika*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan*. Jakarta.
- Prakoso. (2014). Pengaruh (Studi pada karyawan PT Axa Financial Indonesia cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- Priyoto. (2015). *Perubahan dalam perilaku kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qurrahman. (2016). Pengaruh frekuensi menguras terhadap jumlah *Candida* sp. pada air. *Jurnal Ilmiah Biologi Biogenesis*.
- Rahayu, P. T. (2019). *Pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan*. Yogyakarta: Lumbung Pustaka UNY.
- Rahmi, N., & Winarti, P. (2009). Pengolahan limbah cair domestik menggunakan lumpur aktif proses aerob. *Jurnal Teknik Kimia*, Universitas Diponegoro Semarang.
- RI, Departemen Kesehatan. (2009). *Panduan penyelenggaraan cuci tangan pakai sabun (CTPS)*. Jakarta.
- Riani, E., & Ariana, N. (2019). Analisis sistem penangkal petir pada BTS. *Unimus Makassar*.

- Rusdayanti. (2017). Pengaruh lingkungan kerja, keselamatan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Rajawali Jaya Sakti di Makassar. *Unismuh Makassar*.
- Sihaloho, R. D., & Siregar, H. (2019). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Super Setia Sagita Medan. *Jurnal Ilmiah Socio Secretum*.
- SM, A., & Samosir OB. (2010). *Dasar- dasar demografi edisi 2*. Salemba Empat.
- Sugiharto. (2008). *Dasar-dasar pengelolaan air limbah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiasworo, L. (2014). *Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zammani, Y. A., Yulianto, & Lagiono. (2019). Pemenuhan standar kesehatan lingkungan perkantoran Gedung R1 Lantai 2 Kampus 7 Poltekkes Semarang tahun 2019. *Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang*.
- Zharfan, F. (2019). Pengaruh standar sarana dan prasarana toilet terhadap kinerja karyawan. Diakses dari <https://www.academia.edu>